

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM
DAN SETELAH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA PEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi & bisnis

OLEH

**RISA ARDIANTI
105730414613**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM
DAN SETELAH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



OLEH

RISA ARDIANTI

105730414613

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTTO HIDUP

Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang dapat siap dalam semalam
Begitupun ketika kita memikirkan ingin menjadi apa dan seperti siapa
Maka bersiaplah dari sekarang untuk menyambut sebuah kesempatan
Karena kesuksesan datang disaat kesempatan dan persiapan berjumpa



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezki dan kesabaran untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimah kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku dan saudara-saudariku tersayang yang telah memberiku semangat dan motivasi serta dukungan materi untuk perjuanganku ini. Dan tak lupa pula dengan sahabatku yang mampu menampung keluh kesahku disaat aku lelah berjuang. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk semua kebaikan kalian semoga yang akan datang kita sukses semua amin.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 (0411) 860972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**

Nama Mahasiswa : **RISA ARDIANTI**

Stambuk : **105730414613**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Akuntansi**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 25 Mei 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 17 Juni 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sanusi A.M, SE, M.Si
NBM. 602417

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA, CSP
NBM. 107 3428

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA, CSP
NBM. 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 (0411) 860972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **RISA ARDIANTI, NIM 105730414613** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 159/2019, Tanggal 18 Ramadhan Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal.

18 Ramadhan 1440 H
Makassar, 25 Mei 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E, MM
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji

1. Dr. Agus Salim HR, S.E., MM
2. Ismail Badollahi, S.E., M.So., Ak., CA., CSP
3. Faidul Adzim, S.E., M.Si
4. Samsul Risal, S.E., MM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**



**Ismail Rasulong, S.E, MM
NBM 903 078**

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISA ARDIANTI**
NIM : 105730414613
Program Studi : Akuntansi
Judul : **Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan TIM penguji adalah asli hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Juni 2019
Yang



Diketahui

Pembimbing I

Handwritten signature of Pembimbing I, Drs. H. Sanusi A.M., SE, M.Si.

Pembimbing II

Handwritten signature of Pembimbing II, Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA, CSP.

Drs. H. Sanusi A.M., SE, M.Si
NBM. 602417

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA, CSP
NBM. 107 3428

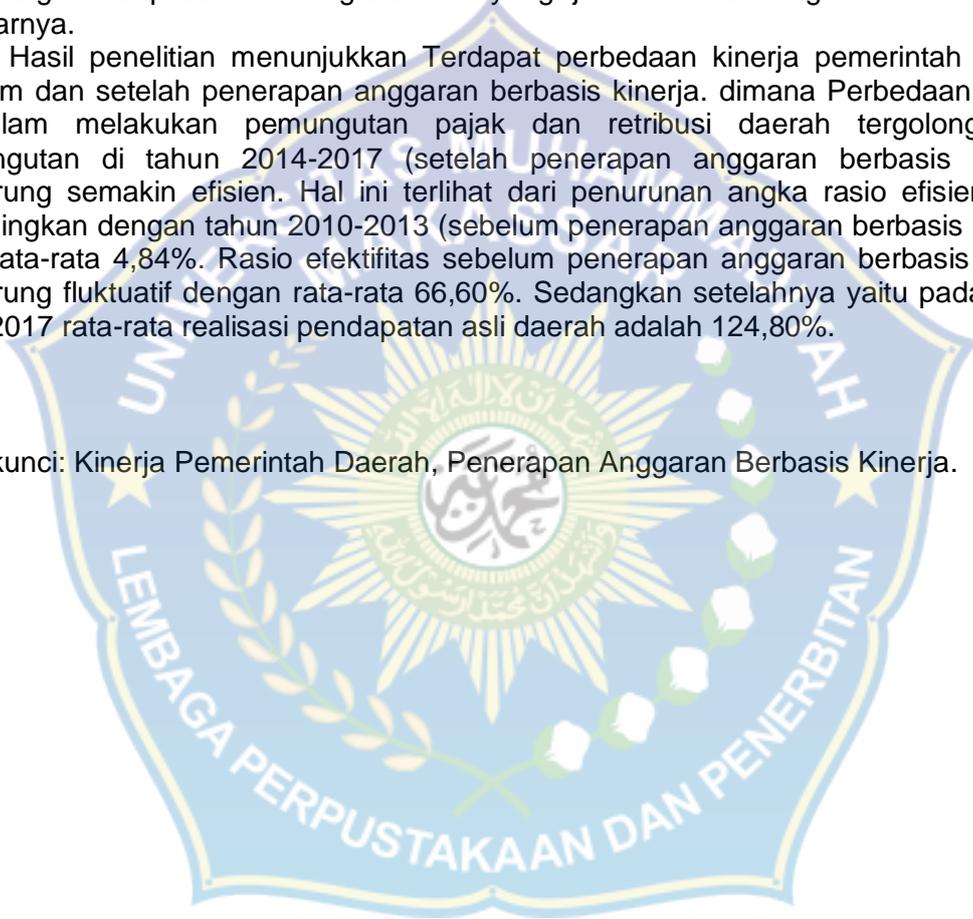
ABSTRAK

RISA ARDIANTI, 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I H. Sanusi A.M dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Metode Analisis yang digunakan Metode Deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. dimana Perbedaan kinerja ini dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah tergolong baik, Pemungutan di tahun 2014-2017 (setelah penerapan anggaran berbasis kinerja) cenderung semakin efisien. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio efisiensi bila dibandingkan dengan tahun 2010-2013 (sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja) yang rata-rata 4,84%. Rasio efektifitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja cenderung fluktuatif dengan rata-rata 66,60%. Sedangkan setelahnya yaitu pada tahun 2014-2017 rata-rata realisasi pendapatan asli daerah adalah 124,80%.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.



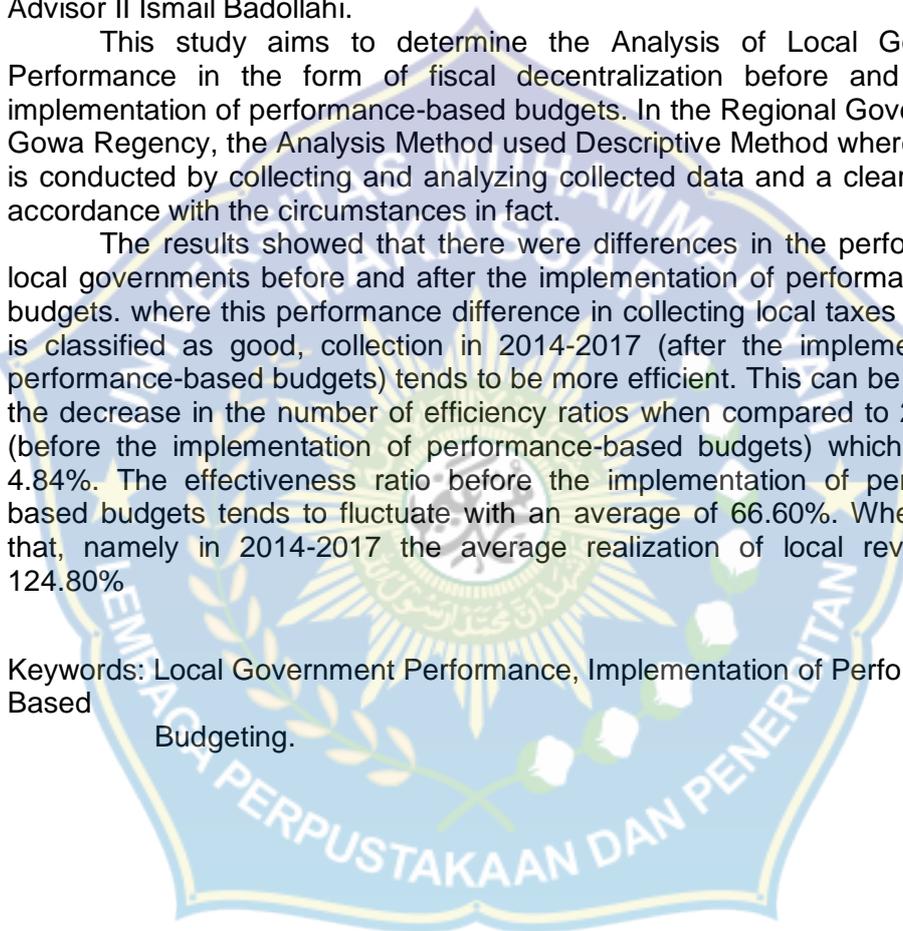
ABSTRAK

RISA ARDIANTI, 2019. Analysis of Local Government Performance Before and After Implementation of Performance-Based Budgeting in Gowa Regency Government, Thesis of the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I H. Sanusi A.M and Advisor II Ismail Badollahi.

This study aims to determine the Analysis of Local Government Performance in the form of fiscal decentralization before and after the implementation of performance-based budgets. In the Regional Government of Gowa Regency, the Analysis Method used Descriptive Method where research is conducted by collecting and analyzing collected data and a clear picture in accordance with the circumstances in fact.

The results showed that there were differences in the performance of local governments before and after the implementation of performance-based budgets. where this performance difference in collecting local taxes and levies is classified as good, collection in 2014-2017 (after the implementation of performance-based budgets) tends to be more efficient. This can be seen from the decrease in the number of efficiency ratios when compared to 2010-2013 (before the implementation of performance-based budgets) which averaged 4.84%. The effectiveness ratio before the implementation of performance-based budgets tends to fluctuate with an average of 66.60%. Whereas after that, namely in 2014-2017 the average realization of local revenue was 124.80%

Keywords: Local Government Performance, Implementation of Performance-Based Budgeting.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul " Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian Program Sarjan (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd.salam dan Ibu Syahrani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih.

Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA.,CSP selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sanusi A.M.,SE,M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.

5. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA.,CSP selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ijian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Juran Akuntansi angkatan 2013 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatus yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dikungannya sehinggga sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Oktober
2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Populasi dan Sampel	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	37
B. Visi dan Misi.....	39
C. Struktur Organisasi	41
D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tentang Pengelolaan Anggaran.....	42
E. Laporan Anggaran dan Realisasi Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran Berbasis Kinerja Tahun 2012-2013	44
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	32
4.1	Realisasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2012	46
4.2	Realisasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2013	47
4.3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	48
4.4	Rasio Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Gowa.....	49
4.5	Rasio Efektifitas	50
4.6	Rasio Efisiensi	51
4.7	Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah.....	52
4.8	Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah	54
4.9	Rasio Standar Penerimaan Pendapatan.....	54
4.10	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD.....	55
4.11	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD	55
4.12	Rasio Pertumbuhan	56
4.13	Ringkasan Rasio Pertumbuhan	56

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir Penelitian	31
4.1 Struktur Organisasi	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility* dan *accountability*.

Selain itu juga, unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajiban (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

Dengan adanya reformasi, sistem pemerintahan yang semula sentralistik kemudian diubah dengan sistem desentralisasi. Tuntutan desentralisasi ini muncul paling tidak karena dua alasan utama yaitu adanya potensi disintegrasi bangsa dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi sistem pemerintahan Indonesia diberlakukan dengan keluarnya UU NO 22 TH 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 32 TH 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU NO 25 TH 1999 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 33 TH 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2000, juga selalu dengan semangat *good governance*, yang ditandai dengan ditetapkannya peraturan perundangan. Khususnya di bidang pengelolaan keuangan Negara yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000. Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dalam PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000, secara implisit dan eksplisit telah diatur agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat dalam:

1. Struktur APBD yang menggabungkan anggaran defisit yang terdiri dari pendapatan, Belanja, dan pembiayaan (PP 105/2000 pasal 15)
2. Anggaran Berbasis Kinerja dalam belanja dikelompokkan berdasarkan klasifikasi fungsi. (105/2000 pasal 20)

3. Klasifikasi anggaran belanja berubah dari belanja rutin dan belanja pembangunan (*dual budgeted*) menjadi klasifikasi belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga (*unfield budget*). (PP 105/2000 pasal 35)

Selain itu terdapat pula Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat dibidang politik. Desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara berdasarkan prestasi kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Fokus utama dari anggaran berbasis kinerja adalah pada tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas.

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam *Concept Statements* No. 2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator yaitu: (1) Indikator pengukuran *service efforts*. Berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. (2) Indikator pengukuran *service accomplishment*. Diartikan sebagai prestasi dari program tertentu, (3) Indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*.

Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (*explanatory information*). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah. Apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut. Perbandingan *serviceefforts* dengan *service accomplishment* merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBD, maka semua pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberapa aspek keuangan dalam APBD. Aspek-aspek tersebut antara lain: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara otonomi daerah, (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah, (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, (5) Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Memiliki era reformasi, masyarakat disebagian besar wilayah Indonesia, baik diprovinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam

pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah peropersi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Selain kinerja keuangan pemerintah daerah, masyarakat juga ingin adanya perubahan dari kinerja non keuangan pemerintahan daerah yang mencakup kinerja pegawai dan bagaimana pelayanan yang di berikan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA”**.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang kinerja pemerintah daerah baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan sebelum dan setelah pemberlakuan anggaran Berbasis Kinerja baik setelah pemberlakuan Amggaran Berbasis Kinerja baik dari segi keuangan dan non-keuangannya ataukah tak ada perubahan sama sekali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah, yaitu. “Bagaimana Perbedaan Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dalam berbagi hal, antara lain:

1. Memberikan informasi data empiris mengenai ada tidaknya perbedaan antara kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
3. Manfaat sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.

4. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan akuntansi sektor publik dewasa ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Anggaran

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode dimasa yang akan datang. Dalam pengertian umum ini, tercakup baik anggaran perusahaan, anggaran negara maupun anggaran lembaga-lembaga lainnya. Khusus mengenai anggaran Negara John F. Due (1975), secara terinci memberi pengertian sebagai berikut:

Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang di harapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.

Berdasarkan pengertian anggaran negara sebagaimana di atas, maka melalui anggaran Negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga, secara lebih terinci dapat pula dinyatakan bahwa:

- a. Anggaran Negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun

kebijaksanaan penerima pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut.

- b. Di samping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode di masa depan, dari anggaran Negara dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu.
- c. Sehingga melalui anggaran Negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu. Serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

Selain definisi di atas, masih banyak pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli dibidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut:

“Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama”. (Dedi Nurdiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maufidah Rahmawati Tahun 2007)

Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai pernyataan estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah).
- b. Penyusunan Anggaran Negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan

suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai usuan partai politik.

- c. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta dimana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasi kepada publik untuk diberi masukan dan kritik.
- d. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategis telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat.

2. Fungsi Anggaran

Setelah memahami pengertian anggaran, maka secara tidak langsung dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai fungsi Anggaran Negara sebagai berikut:

- a. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola Negara untuk satu periode di masa yang akan datang.
- b. Karena sebelum anggaran negara dijalankan ia harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari lembaga perwakilan rakyat, berarti

anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih pemerintah.

- c. Karna pada akhirnya tiap anggaran negara harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada Lembaga Permusyawaratan Rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya.

Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan. Namun peran anggaran dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajemen lebih dari sekedar dua hal tersebut, karena anggaran memiliki keterikatan antara perencanaan dan pengendalian.

Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukkan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh mereka.

3. Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Anggaran operasional dan anggaran modal

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.

- 1) Anggaran operasional (*current budget*) digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan kan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya kan menambah anggaran perasioanal untuk biaya pemeliharaannya.

b. Anggaran tentatif dan anggaran anacted

Berdasarkan status, anggaran dibagi menjadi anggaran relatif dan anggaran anacted.

- 1) Anggaran tentatif (*tentative budget*) adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.

2) Anggaran enacted(*enacted budget*) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

c. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus

Dalam penelitian, kekayaan Negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari sedangkan Dana Khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

d. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap(*fixed budget*), apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel (*flexible budget*), harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

e. Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunnya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Anggaran eksekutif (*executive budget*) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Sedangkan anggaran legislatif (*legislative budget*) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

4. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot, Terdapat beberapa pengertian kinerja, yaitu:

- 1) John Witmore dalam *COaching For Performance* (1997 : 104) "Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan". Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan

dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakam/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

1) Kerangka pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisien, dan kualitas pencapaian sarsaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau

dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan intansi pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

2) Manfaat Pengukuran Kinerja

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

a) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Sering kali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengakuan kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu.

Disamping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan dikusi mengenai usulan-usulan program baru.

b) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilita internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintah, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya *management by objective* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

c) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan

pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

- d) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

- e) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang ditentukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja. Pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk memperhatikan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif

kepada publik mengenai pencapaian hasil (*results*) yang diperoleh.

c. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka mencapai misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisien dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- 2) Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- 4) Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

d. Indikator Kinerja

1) Pengertian indikator kinerja

Menurut Dadang Solihin dalam presentasi penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah mengatakan bahwa: “indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran atau tujuan yang telah disepakati dan telah ditetapkan”.

2) Tujuan penggunaan indikator kinerja

★ kuantitatif atau kuantitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran. Melalui penggunaan indikator kinerja, para manajer dan pengambilan keputusan dapat melakukan hal-hal berikut:

- a) Memantau apa yang sedang dilakukan
- b) Menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan
- c) Penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan
- d) Mengola perubahan
- e) Mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai
- f) Meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat

3) Manfaat menyusun indikator kinerja

- a) Memperbaiki kinerja

- b) Memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan
 - c) Meningkatkan akuntabilitas
 - d) Mendorong produktivitas dan kreativitas
 - e) Membantu proses penganggaran
 - f) Mendukung rencana stratejik dan membantu penyusunan tujuan
 - g) Pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif
- e. Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja
- 1) Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat dibidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem penganggaran tersebut diganti

dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai penggantinya adalah anggaran Negara Berdasar Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah anggaran berbasis kinerja.

2) Dasar hukum

Adapun dasar hukum yang mendukung terwujudnya penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, undang-undang nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

3) Anggaran Berbasis Kinerja

Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja:

a) Penerapan strategi organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi adalah sebuah pandang yang jauh ke depan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat:

- 1) Mencerminkan apa yang akan dicapai
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas

- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- 4) Memiliki orientasi masa depan
- 5) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi
- 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

b) Pembuatan tujuan

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilakan dengan tujuan operasional. Karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Harus mempresentasikan hasil akhir (*true endsloutcome*) bukannya keluaran (*output*).
- b) Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan telah dicapai.
- c) Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi (*corrective action*).

- d) Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu. Namun ketepatan ini seharusnya tidak berada pada perincian yang salah.

5. Penetapan Aktivitas

Tujuan operasional akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Ketika pendekatan kinerja yang digunakan maka langkah yang harus kita lakukan dalam penyusunan anggaran adalah penetapan aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

Operasional kemudian membuat sebuah unit/paket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Tujuan aktivitas tersebut, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas.
- b. Alternatif aktivitas/alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak.
- c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.
- d. Input, kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan, dan hasil pada berbagai tingkat pendanaan.

6. Evaluasi dan pengambilan keputusan

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan (penelitian dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Teknisnya, alternatif keputusan dari semua aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam suatu tabel dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai suatu yang berbeda.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan analisis perbandingan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja pernah dilakukan penelitian terdahulu yakni penelitian oleh Hesrini (2015) melakukan penelitian tentang “ Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan BEA dan Cukai Gresik”. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan indikator anggaran berbasis kinerja pada kantor pengawasan dan pelayan bea cukai gresik digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program, dan kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilita, transpransi, dan efektivitas penggunaan anggaran secara terukur.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanda dkk (2016) mealukan penelitian tentang “Analisis Inflementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala-kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan sebelum dapat merealisasikan dengan maksimal sehingga terpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia, masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas u ntuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Verasvera (2016) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah pada dinas provinsi jawa barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator. (a) efesiensi, setiap aparatur pada dinas sosial provinsi jawa barat telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin dan setiap kegiatan , program, dan kebikan tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efesiensi biaya sehingga dapat mencegah pemborosan, (b) efektivitas, program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap aparatur telah berjalan epektif, (c) pertumbuhan pegawai, keadaan aparatur dinas sosial provinsi jawa barat telah memadai baik segi kualitas maupun kuantitas (d) kepuasan

pelanggan, kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah sesuai yang diharapkan.

Subiyantoro (2011) melakukan penelitian tentang “ Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto”. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dilingkup badan perencanaan dan pembangunan kota Mojokerto. Sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga tidak terjadi pemborosan yang tentunya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari badan perencanaan dan pembangunan kota Mojokerto

Lestari(2009) melakukan penelitian tentang “ Analisa Perbedaan Kinerja Keuangan pemerintah Kota Kediri Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan rasio kemandirian pemerintah kota Kediri menunjukkan hasil rata-rata 113% pada periode sebelum pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan meningkat 295% pada periode sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja.

Kurrohman (2013) melakukan penelitian tentang “Evaluasi penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur”. Metode yang

digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota Jawa Timur pada periode sesudah dan sebelum penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terdapat perbedaan kinerja keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Endrayani, dkk. (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT Bali Tengah Kota Singaraja”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien determinasi atau *R square* yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja. Sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. (2) Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, menghasilkan persamaan regresi linier sederhana $Y = 29,184 + 0,752 X$ yang mana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, yang membandingkan hasil thitung dengan ttabel menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel ($5,558 > 2,03693$) maka H_0 berada pada daerah penolakan, yang berarti H_1 diterima.

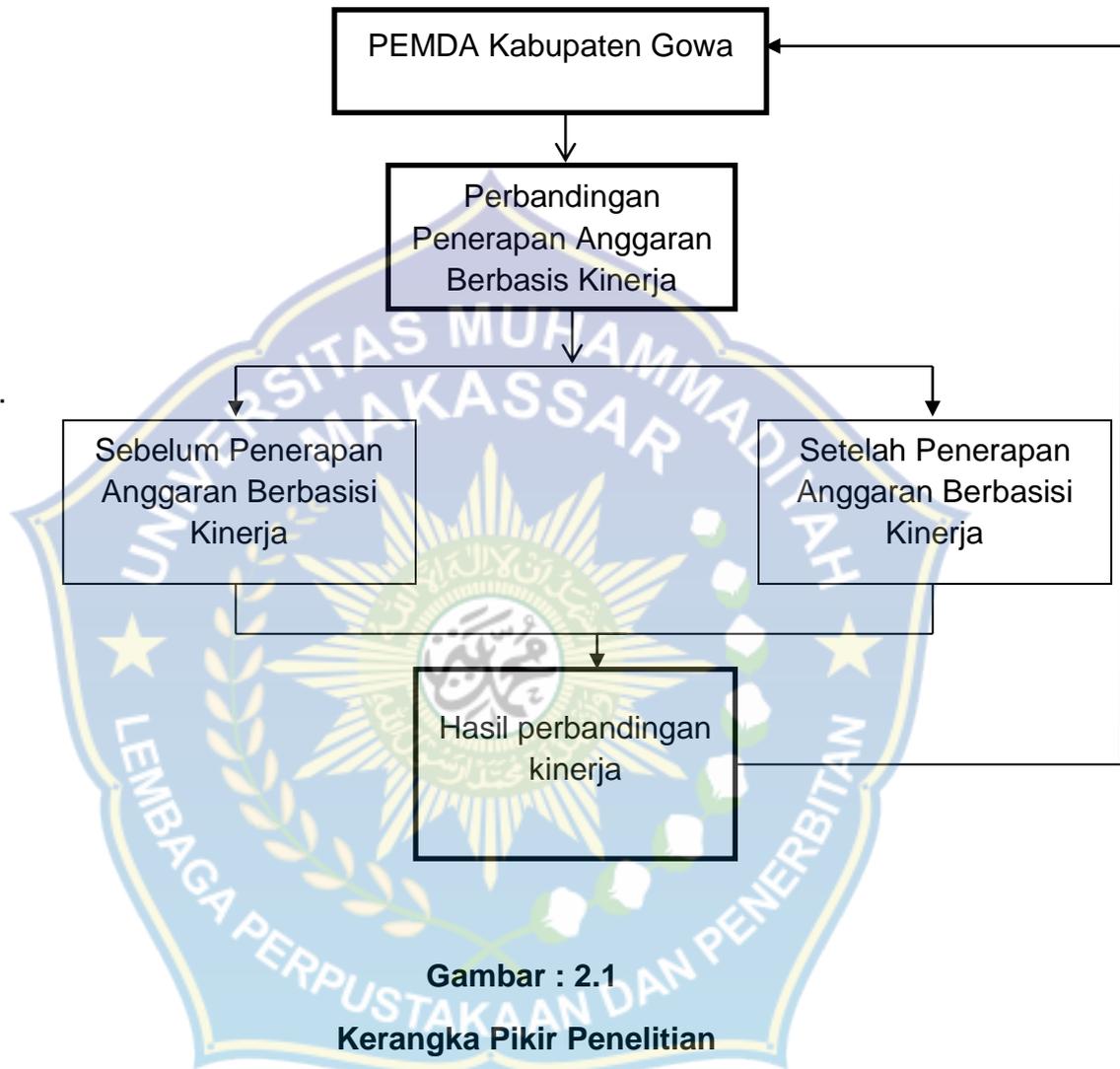
Andriani, dkk (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada

Politeknik Negeri Padang)”. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja.

Tamasoleng (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan anggaran dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja belum dilaksanakan. (2) Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu menyangkut Perencanaan Anggaran (Renstra SKPD belum sepenuhnya mendukung ketercapaian visi dan misi kabupaten, meskipun capaian kinerja dari LAKIP menunjukkan peningkatan.

Salawati (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Provinsi Gorontalo”. Metode yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Kerangka Pikir



Gambar : 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian kualitatif dikembangkan dari telaahan teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian secara empiris. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

:

A. Jenis Penelitian

1) Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Berupa rekapitulasi anggaran pemerintah daerah, realisasi anggaran penerimaan, pengukuran pencapaian sasaran, rencana kinerja tahunan dan pengukuran kinerja kegiatan, daftar hadir pegawai.

2) Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Berupa gambaran umum, struktur organisasi dan pembagian tugas, sumber daya manusia aparatur, visi dan misi organisasi, faktor-faktor kunci keberhasilan, serta tujuan dan sasaran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

C. Tempat dan Waktu penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian yang dilakukan pada kantor Bupati Gowa yang berlokasi di jalan Masjid Raya No.30 Sungguminasa. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu selama dua bulan yaitu, mulai bulan Maret-Mei tahun 2018.

D. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan pimpinan atau pegawai.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten gowa dengan menggunakan metode pengumpulan data *Purposive Sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu di butuhkan karakteristik Sampling dimana diperlukan suatu karakter tertentu yakni Kabupaten Gowa yang sudah ada sejak otomomi belum diberlakukan. Sekian banyak jumlah populasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bagian anggaran yakni terdapat 15 orang.

Data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai dasar perhitungan kinerja untuk periode sebelum dan setelah berbasis kinerja.

Periode ralisasi APBD yang menjadi pengamatan penelitian ini adalah periode sebelum anggaran berbasis kinerja (tahun

2012-2013) dan setelah anggaran berbasis kinerja (tahun 2014-2017).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara dengan cara melakukan pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan pimpinan atau pegawai bagian anggaran Kantor Bupati Gowa.
2. Kusioner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membagikan kusioner kepada tiap-tiap pegawai bagian anggaran Kantor Bupati Gowa.

G. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terbentuk pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang terbentuk pada awal tahun 2009 yang merupakan gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Dearah Kabupaten Gowa. Latar belakang terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor

39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di lebur kembali menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang perencanaan, pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efesien telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa Otonomi Daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten / Kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

a. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan ;

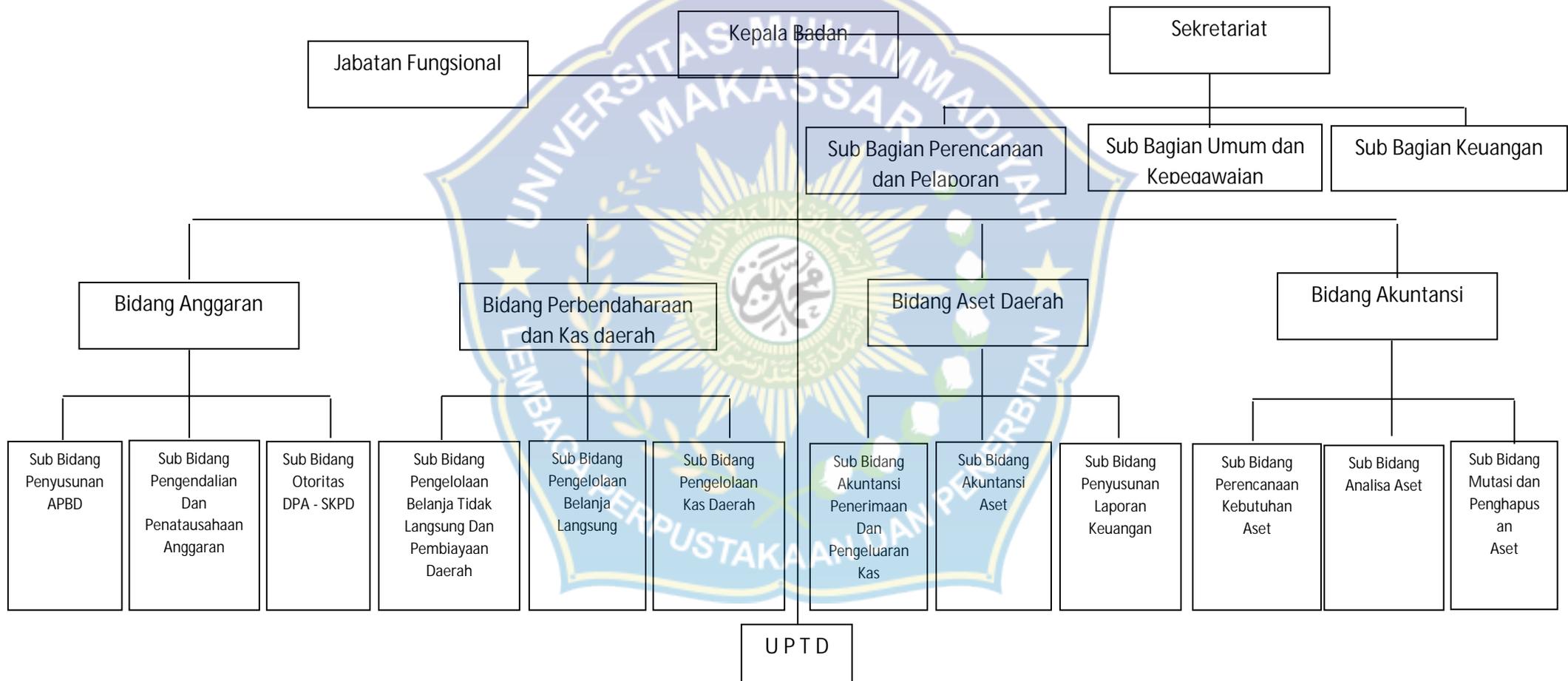
- b. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik daerah.

Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi.



3. Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi



D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Gowa Tentang Pengelolaan Anggaran.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Adanya pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan disusunnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam proses penyusunan APBD

ini disamping harus berpedoman dengan Rencana Jangka Menengah Daerah, APBD juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional. Untuk tujuan sinkronisasi tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013. Dalam Proses penyusunan APBD, Pemda mengajukan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD (UU no 17 tahun 2003, pasal 18 ayat 1).

Tulisan berikut ini mendeskripsikan sedikit uraian mengenai perencanaan pembangunan di daerah dan Kebijakan Umum Anggaran. Uraian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dibatasi pada latar belakang penyusunan KUA dan isinya.

E. Laporan anggaran dan realisasi sebelum dan setelah perubahan anggaran berbasis kinerja tahun 2012-2013

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran sebelum dan setelah perubahan anggaran berbasis kinerja tahun 2012-2013.

Tabel 1. Realisasi anggaran sebelum dan sesudah perubahan anggaran tahun 2012

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
I.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 47.296.371.970,00	Rp 48.047.907.560,00	Rp 46.894.377.087,53	Rp (1.153.536.872,47)
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 1.431.418.000,00	Rp 2.375.356.654,88	Rp 1.908.326.003,00	Rp (467.028.751,88)
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 3.258.487.610,00	Rp 2.951.424.110,00	Rp 2.458.847.615,41	Rp (504.578.494,59)
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp 400.000.000,00	Rp 221.559.000,00	Rp (178.441.000,00)
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 42.186.486.360,00	Rp 42.311.127.195,12	Rp 42.307.343.969,12	Rp (3.784.620,00)
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 207.419.834.813,50	Rp 215.868.128.845,67	Rp 212.622.477.710,69	Rp (3.365.651.134,98)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 13.430.917.813,50	Rp 21.907.211.843,67	Rp 24.627.477.710,69	Rp 2.620.265.865,02
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 174.855.000.000,00	Rp 174.855.000.000,00	Rp 174.855.000.000,00	Rp -
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 19.125.917.000,00	Rp 18.125.917.000,00	Rp 13.140.000.000,00	Rp (5.985.917.000,00)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 8.483.847.000,00	Rp 8.483.847.000,00	Rp 8.508.847.000,00	Rp 105.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 263.202.053.783,50	Rp 272.419.883.805,67	Rp 268.005.701.798,22	Rp (4.414.182.007,45)
II.	BELANJA				
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 135.890.125.143,94	Rp 145.879.012.561,11	Rp 138.500.894.557,54	Rp (7.378.019.303,57)
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 114.030.536.438,42	Rp 121.528.002.210,02	Rp 118.122.666.888,00	Rp (3.706.236.224,02)
2.1.2.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 90.645.096.188,22	Rp 102.153.085.864,21	Rp 99.976.485.201,00	Rp (2.186.600.603,21)
2.1.3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.035.578.400,00	Rp 10.476.608.745,81	Rp 9.561.786.635,00	Rp (514.823.060,81)
2.1.4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.207.820.100,00	Rp 6.692.610.100,00	Rp 6.409.058.250,00	Rp (282.751.850,00)
2.1.5.	Belanja Pemeliharaan	Rp 2.054.271.780,23	Rp 2.496.497.500,00	Rp 2.174.436.750,00	Rp (322.060.750,00)
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 7.353.074.965,52	Rp 9.250.302.255,89	Rp 8.231.157.083,00	Rp (1.019.145.172,89)
2.1.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.470.198.655,52	Rp 3.583.794.705,89	Rp 3.135.740.241,00	Rp (448.054.464,89)
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.518.024.950,00	Rp 1.947.039.850,00	Rp 1.768.643.850,00	Rp (178.395.700,00)
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.044.730.000,00	Rp 3.525.468.000,00	Rp 3.302.772.992,00	Rp (392.695.008,00)
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 116.000.000,00	Rp 124.000.000,00	Rp 124.000.000,00	Rp -
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 14.146.513.726,00	Rp 14.789.068.395,90	Rp 12.185.271.438,54	Rp (2.644.636.906,86)
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 89.727.464.843,00	Rp 85.570.633.451,00	Rp 79.772.586.938,97	Rp (15.948.086.512,03)
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 6.547.233.172,80	Rp 2.030.176.448,00	Rp 1.940.874.476,09	Rp (89.301.964,00)
2.2.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 5.150.966.732,00	Rp 811.810.000,00	Rp 809.500.000,00	Rp (2.250.000,00)
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 821.830.000,00	Rp 880.790.000,00	Rp 811.078.036,00	Rp (69.671.964,00)
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 96.160.000,00	Rp 72.030.000,00	Rp 54.650.000,00	Rp (37.380.000,00)
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 478.486.440,00	Rp 268.585.440,00	Rp 265.586.440,00	Rp -
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 22.617.228.135,80	Rp 24.680.588.880,00	Rp 21.430.908.882,00	Rp (3.249.679.098,00)
2.2.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.022.136.000,00	Rp 4.298.114.894,00	Rp 4.050.161.304,00	Rp (247.953.490,00)
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.215.699.235,00	Rp 11.463.744.135,00	Rp 9.896.042.870,00	Rp (1.567.701.265,00)
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.114.435.800,00	Rp 4.614.072.900,00	Rp 4.107.512.424,00	Rp (506.560.476,00)
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 4.265.057.000,00	Rp 4.304.657.000,00	Rp 3.377.193.226,00	Rp (927.463.774,00)
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 60.573.001.636,20	Rp 58.859.868.122,00	Rp 46.250.802.579,97	Rp (12.609.066.542,03)
2.3.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp 14.967.314.500,00	Rp 16.387.767.497,00	Rp 15.826.377.750,00	Rp (561.389.747,00)
2.4.	BELANJA TAK TERANGKA	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp 446.516.500,00	Rp (153.483.500,00)
	JUMLAH BELANJA	Rp 241.194.904.886,94	Rp 248.337.413.609,11	Rp 224.404.475.746,51	Rp (23.832.938.062,60)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 22.007.148.296,56	Rp 24.082.469.996,56	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15
III.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.	Pengeluaran Daerah	Rp 22.007.148.296,56	Rp 24.082.469.996,56	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	Rp 2.000.000.000,00	Rp 4.079.000.000,00	Rp -	Rp (4.079.000.000,00)
3.2.2.	Penyertaan Modal	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00	Rp -
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 7.149.296,56	Rp 3.469.996,56	Rp 23.601.226.051,71	Rp 23.597.756.055,15
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp (22.007.148.296,56)	Rp (24.082.469.996,56)	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15

Tabel 2. Realisasi anggaran sebelum dan sesudah perubahan anggaran tahun 2013

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
L. PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 28.018.250.520,00	Rp 12.248.153.875,00	Rp 10.415.647.156,38	Rp (1.832.508.716,62)
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 1.990.863.000,00	Rp 1.990.863.000,00	Rp 1.802.509.307,84	Rp (188.353.692,16)
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 4.292.541.175,00	Rp 3.762.726.935,00	Rp 2.943.296.773,14	Rp (819.430.161,86)
1.1.3.	Bagi Hasil M&K Perusahaan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 21.732.846.345,00	Rp 6.494.563.940,00	Rp 5.569.841.015,40	Rp (104.722.924,60)
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 163.007.877.951,44	Rp 171.740.731.655,49	Rp 172.139.433.628,00	Rp 378.792.172,61
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 19.363.126.636,69	Rp 27.004.026.794,49	Rp 27.841.343.267,00	Rp 837.216.472,51
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 126.733.000.000,00	Rp 128.733.000.000,00	Rp 127.334.000.000,00	Rp (801.000.000,00)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 15.290.000.000,00	Rp 15.290.000.000,00	Rp 12.690.000.000,00	Rp (2.600.000.000,00)
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	Rp 1.621.751.314,75	Rp 2.733.704.861,00	Rp 4.074.190.961,00	Rp 1.340.485.700,00
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 19.356.900.000,00	Rp 19.358.010.000,00	Rp 19.441.834.790,00	Rp 85.934.790,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 210.380.128.871,44	Rp 293.364.885.830,49	Rp 301.999.715.774,38	Rp (1.368.169.756,11)
M. BELANJA					
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 113.981.438.739,80	Rp 139.696.658.173,26	Rp 116.671.143.389,97	Rp (9.017.414.783,29)
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 36.526.933.467,80	Rp 100.465.178.948,26	Rp 93.878.358.175,97	Rp (6.586.820.773,29)
2.1.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 77.859.836.467,80	Rp 79.730.804.825,26	Rp 78.323.911.015,00	Rp (4.406.893.810,26)
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.947.720.800,00	Rp 10.896.338.139,00	Rp 10.384.200.389,97	Rp (512.137.749,03)
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.728.203.000,00	Rp 7.833.879.000,00	Rp 6.416.304.250,00	Rp (1.417.574.750,00)
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.691.167.500,00	Rp 1.004.157.985,00	Rp 1.750.942.521,00	Rp (153.215.464,00)
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 8.469.535.373,00	Rp 13.110.836.483,00	Rp 11.410.597.878,00	Rp (1.700.340.614,00)
2.1.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 4.152.129.572,00	Rp 5.660.012.962,00	Rp 4.467.550.128,00	Rp (1.192.462.864,00)
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.172.720.000,00	Rp 3.307.120.500,00	Rp 3.162.478.750,00	Rp (144.641.250,00)
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.399.470.000,00	Rp 3.977.320.000,00	Rp 3.671.869.500,00	Rp (305.450.500,00)
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 145.500.000,00	Rp 166.700.000,00	Rp 308.700.000,00	Rp (163.200.000,00)
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 10.484.976.000,00	Rp 12.012.440.733,00	Rp 11.265.187.334,00	Rp (747.253.399,00)
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 84.783.883.444,00	Rp 80.221.859.888,79	Rp 74.381.145.523,00	Rp (10.340.714.345,79)
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 9.003.048.430,00	Rp 9.821.824.019,03	Rp 9.187.510.665,00	Rp (434.113.954,03)
2.2.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 6.224.738.430,00	Rp 6.835.357.019,03	Rp 6.439.681.950,00	Rp (395.675.069,03)
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.595.947.000,00	Rp 2.536.847.000,00	Rp 2.500.956.115,00	Rp (35.890.885,00)
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 43.200.000,00	Rp 43.200.000,00	Rp 42.288.500,00	Rp (911.500,00)
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 109.720.000,00	Rp 205.120.000,00	Rp 204.617.000,00	Rp (503.000,00)
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 24.798.929.855,00	Rp 25.122.206.705,00	Rp 23.743.552.600,00	Rp (1.378.654.105,00)
2.2.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.143.058.600,00	Rp 3.344.403.000,00	Rp 3.007.908.500,00	Rp (336.495.000,00)
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.191.619.100,00	Rp 15.718.512.950,00	Rp 14.893.693.100,00	Rp (824.819.850,00)
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.964.730.000,00	Rp 5.229.100.000,00	Rp 5.077.340.000,00	Rp (151.860.000,00)
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.167.519.255,00	Rp 830.190.255,00	Rp 764.711.800,00	Rp (65.479.255,00)
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 46.367.616.109,00	Rp 56.362.184.609,00	Rp 37.221.747.814,00	Rp (13.140.406.895,00)
2.3.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp 2.768.000.000,00	Rp 4.591.888.325,00	Rp 4.260.177.324,00	Rp (331.711.001,00)
2.4.	BELANJA TAK TERSANGKA	Rp 250.000.000,00	Rp 503.986.040,76	Rp 408.157.750,00	Rp (95.828.290,76)
JUMLAH BELANJA		Rp 198.765.027.183,80	Rp 215.810.418.072,05	Rp 191.459.288.942,97	Rp (24.358.129.129,08)
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp 11.615.101.287,64	Rp (12.445.532.241,56)	Rp 10.544.426.831,41	Rp 22.989.959.372,97
N. PEMBIAYAAN					
3.1.	Penerimaan Daerah	Rp -	Rp 23.601.228.251,71	Rp 23.593.098.352,71	Rp (8.127.659,00)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp -	Rp 23.601.228.251,71	Rp 23.575.925.951,71	Rp (25.300.100,00)
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.4.	Hasil Perjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Hutang Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp 17.172.401,00	Rp 17.172.401,00
3.2.	Pengeluaran Daerah	Rp 11.615.101.287,64	Rp 11.155.693.819,16	Rp 11.137.625.184,12	Rp 22.981.831.873,97
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.2.	Penyerahan Modal	Rp 11.154.658.980,15	Rp 11.154.658.980,15	Rp 11.154.658.980,15	Rp -
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 460.442.307,49	Rp 1.034.530,00	Rp 22.982.866.203,97	Rp 22.981.831.873,97
JUMLAH PEMBIAYAAN		Rp (11.615.101.287,64)	Rp 12.445.532.241,56	Rp (10.544.426.831,41)	Rp (22.989.959.372,97)

1. Rasio Keuangan Daerah

Pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah tidak sama dengan pemerintah daerah, bedanya terletak pada pengaruh terhadap ekuitas dana.

Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah

Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pembaca laporan keuangan dapat membuat berbagai analisis rasio keuangan berupa :

a. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi.

Tabel 3. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah

TAHUN	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	TOTAL PENERIMAAN PAD	RASIO
1	2	3	(2:3) x 100%
2012	-	-	-
2013	4.074.190.561,00	23.593.098.352,71	17,26%
2014	2.653.367.877,00	22.982.866.203,97	11,54%
2015	-	11.397.172.401,00	-
2016	-	40.228.645.498,65	-
2017	3.803.149.411,64	107.332.098.922,29	3,54%
RATA-RATA			10,78%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

b. Rasio kemandirian keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 4. Rasio Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Gowa

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	TINGKAT KEMANDIRIAN
1	2	3	(2:3) x 100%
2010	6.372.020.296,59	200.592.839.308,46	3,18%
2011	8.943.567.594,00	223.937.798.481,12	3,99%
2012	10.724.132.537,41	268.005.701.797,69	4,00%
2013	10.415.647.156,38	225.589.814.127,09	4,62%
	Rata-rata		2,79%
2014	15.226.862.946,33	346.642.142.263,06	4,39%
2015	17.684.501.773,18	390.730.293.591,24	4,53%
2016	16.918.809.690,38	454.787.841.797,86	3,72%
2017	22.856.821.790,51	334.380.353.045,15	6,84%
	Rata-rata		5,01%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indicator rasio efektivitasnya PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sngat

besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran

a. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas menggambarkan tingkat pencapaian dalam perolehan anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 5. Rasio Efektifitas

TAHUN	REALISASI PAD	TARGET PENERIMAAN PAD	RASIO EFEKTIFITAS
1	2	3	(2:3) x 100%
2010	6.372.020.296,59	7.488.889.581,00	85,09%
2011	8.943.567.594,00	9.087.307.542,72	98,42%
2012	10.724.132.537,41	12.935.276.889,00	82,91%
2013	10.415.647.156,38	12.248.153.875,00	85,04%
	Rata-rata		66,60%
2014	15.226.862.946,33	13.222.853.537,66	115,16%
2015	17.684.501.773,18	14.602.174.800,00	121,11%
2016	16.918.809.690,38	15.199.611.100,64	111,31%
2017	22.856.821.790,51	25.563.906.855,81	89,41%
	Rata-rata		124,80%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

b. Rasio Efisiensi

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam perhitungan rasio efisiensi, perlunya dihitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah proses pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Tabel 6. Rasio Efisiensi

TAHUN	BY. PEMUNGUTAN PAD	TOTAL PENERIMAAN PAD	RASIO EFISIENSI
2010	273.996.872,75	6.372.020.296,59	4,30%
2011	585.803.677,41	8.943.567.594,00	6,55%
2012	447.196.326,81	10.724.132.537,41	4,17%
2013	341.633.226,73	10.415.647.156,38	3,28%
	Rata-rata		5,16%
2014	465.942.006,16	15.226.862.946,33	3,06%
2015	478.153.908,00	17.684.501.773,18	2,70%
2016	870.016.496,00	16.918.809.690,38	5,14%
2017	742.846.708,19	22.856.821.790,51	3,25%
	Rata-rata		4,84%

Sumber data : Bagian Keuangan Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga

dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10 % (semakin kecil rasio ini semakin baik). Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak. Data ini bisa diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

Tabel 7. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

TAHUN	BY. PEMUNGUTAN PAJAK	TOTAL PENERIMAAN PAJAK	RASIO
2012	1.908.326.903,00	2.375.355.654,88	8,03%
2013	1.902.509.367,84	1.990.863.000,00	9,55%
2014	1.710.594.047,00	2.179.211.029,50	7,84%
2015	2.528.561.132,67	1.945.000.000,00	3,00%
2016	1.956.584.022,00	2.946.230.276,00	6,64%
2017	1.769.235.446,25	4.041.118.888,00	4,37%
RATA-RATA			6,57%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

a. Rasio utang Terhadap Pendapatan Daerah

Selain dilihat dari rasio DSCR, kinerja pinjaman daerah juga dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio). Rasio ini sudah dibahas pada rasio DSCR yang

lebih cenderung digunakan oleh pihak internal manajemen pemerintah daerah, sedangkan rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman

Analisis potensi ini bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan berinvestasi. Analisis potensi PAD dilakukan untuk mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu apakah masuk kategori potensi, prima, berkembang, atau terbelakang. Selanjutnya setelah diketahui potensinya tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang dikategorikan potensi dan berkembang dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk kategori prima perlu dilakukan intensifikasi dan untuk kategori terbelakang dapat dilakukan peninjauan ulang atau bahkan penghapusan.

Semakin besar proporsi suatu pajak atau retribusi dari rerata pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan di masa mendatang. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pajak atau retribusi tersebut maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan di masa datang perlu diintensifkan.

Sementara untuk proporsi tambahan, semakin besar proporsi tambahan suatu pajak atau retribusi dari total penerimaan pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan peningkatannya. Sebaliknya, semakin kecil proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan di masa mendatang perlu diintensifkan.

Tabel 9. Rasio utang Terhadap Pendapatan Daerah

TAHUN	UTANG	TOTAL PAD	RASIO
2012	-	46.894.377.087,53	-
2013	-	10.415.647.156,38	-
2014	-	15.226.862.946,43	-
2015	-	352.292.362.738,38	-
2016	-	414.614.843.299,21	-
2017	59.195.000,00	334.380.353.045,15	1,77%
RATA-RATA			1,77%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

b. Rasio Standar Penerimaan Pendapatan

Rasio standar penerimaan pendapatan bermanfaat untuk pengawasan dan pengendalian manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

Tabel 10. Rasio Standar Penerimaan Pendapatan

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN PAD	TOTAL PENDAPATAN PAD	RASIO
2012	-	46.894.377.087,53	-
2013	23.593.098.352,71	10.415.647.156,38	2,26%
2014	22.982.866.203,97	15.226.862.946,43	1,50%
2015	11.397.172.401,00	352.292.362.738,38	3,23%
2016	40.228.645.498,65	414.614.843.299,21	9,70%
2017	107.332.098.922,29	334.380.353.045,15	3,20%
RATA-RATA			3,97%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

c. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Berdasarkan tabel 1 (perkembangan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2010-2017) secara sederhana rasio keserasian dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

TAHUN	TOTAL BELANJA RUTIN	TOTAL APBD	RASIO
1	2	3	(2:3) x 100%
2010	123.851.621.935,00	200.592.839.308,46	61,74%
2011	66.951.710.663,00	223.937.798.481,12	29,90%
2012	138.508.994.557,54	268.005.701.797,69	51,68%
2013	116.571.143.389,97	225.589.814.127,09	51,67%
Rata-rata			35,83%
2014	157.516.835.322,20	346.642.142.263,06	45,44%
2015	136.170.753.178,00	390.730.293.591,24	34,85%
2016	186.767.590.435,00	454.787.841.797,86	41,07%
2017	273.373.208.391,79	334.380.353.045,15	81,76%
Rata-rata			52,22%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

Tabel 12. Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

TAHUN	TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN	TOTAL APBD	RASIO
1	2	3	(2/3) x 100%
2010	68.553.358.276,00	200.592.839.308,46	34,18%
2011	117.325.057.151,00	223.937.798.481,12	52,39%
2012	69.622.586.938,97	268.005.701.797,69	25,98%
2013	74.881.145.553,00	225.589.814.127,09	33,19%
Rata-rata			28,14%
2014	140.687.376.088,00	346.642.142.263,06	40,59%
2015	202.989.369.513,59	390.730.293.591,24	51,95%
2016	190.672.795.980,57	454.787.841.797,86	41,93%
2017	114.361.307.063,00	334.380.353.045,15	34,20%
Rata-rata			48,95%

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan

No	keterangan	2010	2011	2012	2013
1	Pendapatan Asli Daerah	6.372.020.296,59	8.943.567.594,00	10.724.322.537,41	10.415.647.156,38
	Pertumbuhan PAD	2,00%	40,36%	19,91%	-2,88%
2	Total Pendapatan	200.592.839.308,46	223.937.798.481,12	269.005.701.797,69	225.589.814.127,09
	Pertumbuhan Pendapatan	59,95%	11,64%	19,68%	-15,83%
3	Belanja Rutin	123.851.621.935,00	66.951.710.663,00	138.508.994.557,54	116.571.143.389,97
	Pertumbuhan Belanja Rutin	37,80%	-45,94%	106,88%	-15,84%
4	Belanja Pembangunan	68.553.358.270,00	117.325.057.154,00	69.622.586.938,97	74.861.145.553,00
	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	157,39%	71,14%	-40,66%	7,55%
No	keterangan	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Asli Daerah	15.226.862.946,33	17.694.501.773,18	16.918.809.690,38	22.856.821.790,51
	Pertumbuhan PAD	46,19%	16,14%	-4,33%	35%
2	Total Pendapatan	346.642.142.263,06	390.730.293.591,24	454.787.841.797,86	334.380.353.045,15
	Pertumbuhan Pendapatan	53,66%	12,72%	16,39%	-26%
3	Belanja Rutin	157.516.835.322,20	136.170.753.178,00	186.767.590.435,00	273.373.208.391,79
	Pertumbuhan Belanja Rutin	35,13%	-13,55%	37,16%	46%
4	Belanja Pembangunan	140.687.376.088,00	202.989.369.513,59	190.672.795.980,57	114.361.307.063,00
	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	87,88%	44,28%	-6,07%	-40%

Tabel 14. Ringkasan Rasio Pertumbuhan

Tahun	PAD	pendapatan	belanja rutin	belanja pembangunan
2010	2,00%	59,95%	37,80%	157,39%
2011	40,36%	11,64%	-45,94%	71,14%
2012	19,91%	19,68%	106,88%	-40,66%
2013	-2,88%	-15,83%	-15,84%	7,55%
Rata-rata	14,85%	18,86%	20,72%	48,86%
2014	46,19%	53,66%	35,13%	87,88%
2015	16,14%	12,72%	-13,55%	44,28%
2016	-4,33%	16,39%	37,16%	-6,07%
2017	35,10%	-26,48%	46,37%	-40,02%
Rata-rata	23,27%	14,07%	26,28%	21,52%

Kinerja Non-Kuangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Selain kinerja keuangan, penerapan anggaran berbasis kinerja juga mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten Gowa dari aspek non-keuangannya. Aspek non-keuangan kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dengan mengukur tingkat kehadiran pegawai dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis statistik diatas maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. dimana Perbedaan kinerja ini dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah tergolong baik, Pemungutan di tahun 2014-2017 (setelah penerapan anggaran berbasis kinerja) cenderung semakin efisien. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio efisiensi bila dibandingkan dengan tahun 2010-2013 (sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja) yang rata-rata 4,84%. Rasio efektifitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja cenderung fluktuatif dengan rata-rata 66,60%. Sedangkan setelahnya yaitu pada tahun 2014-2017 rata-rata realisasi pendapatan asli daerah adalah 124,80%.
- b. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran

berbasis kinerja. Perbedaan kinerja ini mengarah kearah yang lebih baik, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2011-2013 (sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja) masih berkisar pada persentasi 86% - 87%. Sedangkan pada tahun 2014-2016 (setelah penerapan anggaran berbasis kinerja) sudah mencapai 90%-96%.

- c. Tidak terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk efesiensi penggunaan anggaran pada era kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris mengenai perbedaan kinerja sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. Data dan informasi berasal dari Kantor Bupati Gowa bagian anggaran untuk sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh dua tahun anggara yakni 2012, 2013 dan untuk tahun setelah penerapan anggaran berbasis kinerja diwakili oleh empat tahun yakni 2014, 2015, 2016, 2017. Analisis yang dilakukan dengan menguji Hipotesis adalah menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja. Perbedaan

yang timbul lebih banyak kearah positif, atau dengan kata lain terjadi peningkatan kinerja secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revison. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Endrayani, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT Bali Tengah Kota Singaraja. *Jurnal Akuntansi Program S1 Vol. 2 No. 1*.
- Halim Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anonim. 2010. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*. Jakarta : CV. Novindo pustaka mandiri
- LGSP. Finance & Budgeting Team. 2009. *Contoh-contoh Indikator Kinerja*.
- Nanda, dkk. 2016. Analisis Inflementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1 No. 1: 327-340*.
- Nordiawan , Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Salawali. 2013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. 2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BBPFE.
- Sugiona. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabet.
- Supardi. 2005. *Metedologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Sangjaya, Beni. 2007. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Desentralisasi Fiskal*. Skripsi. JurusanAakuntansi. Universitas Lampung.

- Subiyantoro. 2011. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto. *Jurnal SNASTI*.
- Hestrini. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan BEA dan Cukai Gresik. *Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTAR Vol. 1 No. 1: 56-70*
- Kurniawan, 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Wilayah Iv Priangan*. Skripsi. Upi. Jakarta.
- Lestari. 2009. Analisa Perbedaan Kinerja Keuangan pemerintah Kota Kediri Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7 No. 2: 152-168*.
- Varasvera. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Vol. 15 No. 2: 137-162*
- Tamasoleng. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1: 97-110*



KUISIONER PENELITIAN

DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir: SMA S1 S2 S3 D1 D3
 Lain-lain

Komisi : 1 2 3 4

Fraksi :

Pada setiap item kuesioner, tunjukkan seberapa jauh Bapak/ Ibu sangat setuju terhadap pernyataan. Berilah tanda ceklis (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/ Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju



DAFTAR PETANYAAN

A. Transparansi

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		5	4	3	2	1
1	Kebijakan atau keputusan yang terkait pengelolaan keuangan yang diambil bisa di pertanggung jawabkan					
2	Pemerintah kota disiplin dalam pengelolaan keuangan sector publik?					
3	Kesusaian antara pengelolaan keuangan dengan prosedur yang ada					
4	Pemerintah profesionalisme dalam pengelolaan keuangan					
5	Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan standar penggunaan input					

B. Akuntabilitas

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		5	4	3	2	1
1	Mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang sebagai pegawai pemerintah kabupaten Gowa					
2	Memeiliki inisiatif menyusun laporan akuntabilitas kinerja disetiap akhir anggaran					
3	Kesesuaian pelaporan yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan					
4	Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku					
5	Sering terjadi kesalahan atau penyimpangan laporan keuangan					

C. Keterbukaan

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
		5	4	3	2	1
1	Optimal dalam menyediakan informasi dalam pengelolaan keuangan sector public					
2	Instansi sering melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan					
3	Komunikasi organisai pemerintah kota dengan masyarakat sangat baik, seperti dalam pelayanan					
4	Pemerintah Gowa sering melakukan sosialisasi program dan kebijakan kepada masyarakat					
5	Pemerintah kabupaten gowa disampaikan kepada masyarakat secara terbuka					





NO. URT	URAIAN	JUMLAH	NO. URT	URAIAN	JUMLAH
A.	PENERIMAAN		B	PENGELUARAN	
1	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T= 2001	= Rp 8.796.412.648,15	1	Belanja Rutin	= Rp 123.851.821.935,00
2	Bagian Pendapatan Asli Daerah	= Rp 6.372.020.296,59		- Belanja Pegawai	= Rp 69.354.645.807,00
	Pos Pajak Daerah	= Rp 790.069.326,00		- Belanja Barang	= Rp 17.668.583.206,00
	Pos Retribusi daerah	= Rp 3.740.573.849,59		- Belanja Pemeliharaan	= Rp 2.404.378.119,00
	Pos Laba Pembelanjaan Daerah	= Rp 20.000.000,00		- Belanja Perjalanan Dinas	= Rp 4.601.807.779,00
	Pos Lain - Lain Pendapatan	= Rp 2.821.427.119,00		- Belanja Lain -Lain	= Rp 5.829.749.310,00
3	Bagian Dana Perimbangan	= Rp 157.710.197.579,14		- Bantuan Subsidi / Sumbangan	= Rp 2.706.270.000,00
	Pos Bagi Hasil Pajak	= Rp 7.947.603.780,00		- Pengeluaran yang Tidak Termasuk salah satu Bagian	= Rp 6.209.911.486,00
	Pos Bagi Hasil Bukan pajak	= Rp 2.550.882.790,14		- Pengeluaran tidak terencana	= Rp 6.555.915.351,00
	Pos Dana Alokasi Umum	= Rp 153.480.000.000,00		- UKP	= Rp 8.502.463.877,00
	Pos Dana Alokasi Khusus	= Rp 3.731.711.000,00	2	Pengeluaran Pembangunan	= Rp 68.553.358.276,00
	Pos Dana Darurat	= Rp		- Sektor Industri	= Rp 905.000.000,00
4	Bagian Pinjaman Daerah	= Rp		- Sektor Pertanian dan Kehutanan	= Rp 5.369.142.000,00
5	Bagian Penerimaan Lain Lain Yang Bah	= Rp 9.211.744.907,58		- Sektor Sumber Daya Air dan Kigasl	= Rp 2.072.156.671,00
6	UKP	= Rp 8.502.463.877,00		- Sektor Tenaga Kerja	= Rp 749.749.900,00
				- Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan Koperasi	= Rp 1.000.000.000,00
				- Sektor Transportasi	= Rp 16.839.994.980,00
				- Sektor Pertambangan dan Energi	= Rp 3.444.000.000,00
				- Sektor Pembangu Daerah dan Pemukiman	= Rp 8.973.163.750,00
				- Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	= Rp 3.108.196.627,00
				- Sektor Pendidikan Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	= Rp 7.468.992.000,00
				- Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	= Rp 360.300.000,00
				- Sektor Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Peranan wanita, anak dan remaja	= Rp 4.095.000.000,00
				- Sektor Perumahan dan Pemukiman	= Rp 3.481.635.000,00
				- Sektor Agama	= Rp 1.090.000.000,00
				- Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	= Rp 1.867.240.000,00
				- Sektor Hukum	= Rp 270.000.000,00
				- Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	= Rp 7.038.787.348,00
				- Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media masa	= Rp 400.000.000,00
			3	UUdp yang diator dalam tahun berkenan (CP)	= Rp 854.535.421,70
	JUMLAH	= Rp 200.592.839.308,46		JUMLAH	= Rp 193.259.515.632,70

**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
I.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 47.298.371.970,00	Rp 48.047.907.960,00	Rp 46.894.377.087,53	Rp (1.153.530.872,47)
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 1.431.418.000,00	Rp 2.375.355.654,88	Rp 1.908.326.903,00	Rp (467.028.751,88)
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 3.258.467.610,00	Rp 2.961.424.110,00	Rp 2.456.847.615,41	Rp (504.576.494,59)
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 420.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 221.859.000,00	Rp (178.141.000,00)
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 42.188.486.360,00	Rp 42.311.128.195,12	Rp 42.307.343.569,12	Rp (3.784.626,00)
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 207.419.834.813,50	Rp 215.888.128.845,67	Rp 212.522.477.710,69	Rp (3.365.651.134,98)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 13.438.917.813,50	Rp 21.907.211.845,67	Rp 24.527.477.710,69	Rp 2.620.265.865,02
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 174.855.000.000,00	Rp 174.855.000.000,00	Rp 174.855.000.000,00	Rp -
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 19.125.917.000,00	Rp 19.125.917.000,00	Rp 13.140.000.000,00	Rp (5.985.917.000,00)
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 8.483.847.000,00	Rp 8.483.847.000,00	Rp 8.588.847.000,00	Rp 105.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 263.202.053.783,50	Rp 272.419.883.805,67	Rp 268.005.701.798,22	Rp (4.414.182.007,45)
II.	BELANJA				
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 135.990.125.143,94	Rp 145.879.012.861,11	Rp 138.508.994.557,54	Rp (7.370.018.303,57)
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 114.030.536.438,42	Rp 121.828.802.210,02	Rp 118.122.565.986,00	Rp (3.706.236.224,02)
2.1.2.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 96.643.066.188,22	Rp 102.163.085.864,21	Rp 99.976.485.261,00	Rp (2.186.600.603,21)
2.1.3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.035.578.400,00	Rp 10.476.608.745,81	Rp 9.561.785.685,00	Rp (914.823.060,81)
2.1.4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.297.620.100,00	Rp 6.692.610.100,00	Rp 6.409.858.250,00	Rp (282.751.850,00)
2.1.5.	Belanja Pemeliharaan	Rp 2.054.271.750,20	Rp 2.496.497.500,00	Rp 2.174.436.790,00	Rp (322.060.710,00)
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 7.813.074.985,52	Rp 9.250.302.255,89	Rp 8.231.157.083,00	Rp (1.019.145.172,89)
2.1.2.1	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.136.320.435,52	Rp 3.583.794.705,89	Rp 3.135.740.241,00	Rp (448.054.464,89)
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.516.024.550,00	Rp 1.947.039.550,00	Rp 1.768.643.850,00	Rp (178.395.700,00)
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.044.730.000,00	Rp 3.595.468.000,00	Rp 3.202.772.992,00	Rp (392.695.008,00)
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 116.000.000,00	Rp 124.000.000,00	Rp 124.000.000,00	Rp -
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 14.146.513.720,00	Rp 14.799.908.395,20	Rp 12.155.271.488,54	Rp (2.644.636.906,66)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 89.737.464.843,00	Rp 85.570.633.451,00	Rp 69.622.586.938,97	Rp (15.948.046.512,03)
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 6.547.233.172,00	Rp 2.030.176.440,00	Rp 1.940.874.476,00	Rp (89.301.964,00)
2.2.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 5.150.966.732,00	Rp 811.810.000,00	Rp 809.560.000,00	Rp (2.250.000,00)
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 821.630.000,00	Rp 880.750.000,00	Rp 811.078.036,00	Rp (69.671.964,00)
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 96.150.000,00	Rp 72.030.000,00	Rp 54.650.000,00	Rp (17.380.000,00)
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 478.486.440,00	Rp 265.586.440,00	Rp 265.586.440,00	Rp -
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 22.617.228.135,00	Rp 24.680.588.889,00	Rp 21.430.909.883,00	Rp (3.249.679.006,00)
2.2.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.022.136.000,00	Rp 4.298.114.854,00	Rp 4.050.161.364,00	Rp (247.953.490,00)
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.215.699.235,00	Rp 11.463.744.135,00	Rp 9.896.042.870,00	Rp (1.567.701.265,00)
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.114.435.900,00	Rp 4.614.072.900,00	Rp 4.107.512.424,00	Rp (506.560.476,00)
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 4.264.957.000,00	Rp 4.304.657.000,00	Rp 3.377.193.225,00	Rp (927.463.775,00)
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 60.573.003.536,00	Rp 58.859.868.122,00	Rp 46.250.802.579,97	Rp (12.609.065.542,03)
2.3.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp 14.967.314.500,00	Rp 16.387.767.497,00	Rp 15.826.377.750,00	Rp (561.389.747,00)
2.4.	BELANJA TAK TERSANGKA	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 446.516.500,00	Rp (53.483.500,00)
	JUMLAH BELANJA	Rp 241.194.904.486,94	Rp 248.337.413.809,11	Rp 224.404.475.746,51	Rp (23.932.938.062,60)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 22.007.149.296,56	Rp 24.082.469.996,56	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15
III.	PEMBIAYAAN	Rp (22.007.149.296,56)	Rp (24.082.469.996,56)	Rp (43.601.226.051,71)	Rp (19.518.756.055,15)
3.1.	Penerimaan Daerah	Rp -	Rp -		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp -	Rp -		
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -		
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -		
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -		
3.2.	Pengeluaran Daerah	Rp 22.007.149.296,56	Rp 24.082.469.996,56	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	Rp 2.000.000.000,00	Rp 4.079.000.000,00	Rp -	Rp (4.079.000.000,00)
3.2.2.	Penyertaan Modal	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00	Rp -
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 7.149.296,56	Rp 3.469.996,56	Rp 23.601.226.051,71	Rp 23.597.756.055,15
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp (22.007.149.296,56)	Rp (24.082.469.996,56)	Rp 43.601.226.051,71	Rp 19.518.756.055,15

**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
I.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 28.016.250.520,00	Rp 12.248.153.875,00	Rp 10.415.647.156,38	Rp (1.832.506.718,62)
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 1.990.863.000,00	Rp 1.990.863.000,00	Rp 1.902.509.367,84	Rp (88.353.632,16)
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 4.292.541.175,00	Rp 3.762.726.935,00	Rp 2.943.296.773,14	Rp (819.430.161,86)
1.1.3.	Bagi Hasil Milik Perusahaan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 21.732.846.345,00	Rp 6.494.563.940,00	Rp 5.569.841.015,40	Rp (924.722.924,60)
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 163.007.877.951,44	Rp 171.760.731.655,49	Rp 172.139.433.828,00	Rp 378.702.172,51
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 19.363.126.636,69	Rp 27.004.026.794,49	Rp 27.841.243.267,00	Rp 837.216.472,51
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 126.733.000.000,00	Rp 126.733.000.000,00	Rp 127.534.000.000,00	Rp 801.000.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 15.290.000.000,00	Rp 15.290.000.000,00	Rp 12.690.000.000,00	Rp (2.600.000.000,00)
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	Rp 1.621.751.314,75	Rp 2.733.704.861,00	Rp 4.074.190.561,00	Rp 1.340.485.700,00
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 19.356.000.000,00	Rp 19.356.000.000,00	Rp 19.441.634.790,00	Rp 85.634.790,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 210.380.128.471,44	Rp 203.364.885.530,49	Rp 201.996.715.774,38	Rp (1.368.169.756,11)
II.	BELANJA				
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 113.981.438.739,80	Rp 125.588.558.173,26	Rp 116.571.143.389,97	Rp (9.017.414.783,29)
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 95.026.933.467,80	Rp 100.465.178.949,26	Rp 93.875.358.175,97	Rp (6.589.820.773,29)
2.1.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 77.659.836.467,80	Rp 79.730.804.825,26	Rp 75.323.911.015,00	Rp (4.406.893.810,26)
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.947.726.500,00	Rp 10.896.338.139,00	Rp 10.384.200.389,97	Rp (512.137.749,03)
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.728.203.000,00	Rp 7.933.578.000,00	Rp 6.416.304.250,00	Rp (1.517.273.750,00)
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.691.167.500,00	Rp 1.904.457.985,00	Rp 1.750.942.521,00	Rp (153.515.464,00)
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 8.469.535.272,00	Rp 13.110.938.492,00	Rp 11.410.597.878,00	Rp (1.700.340.614,00)
2.1.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 4.152.128.572,00	Rp 5.660.012.992,00	Rp 4.467.550.128,00	Rp (1.192.462.864,00)
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.772.436.700,00	Rp 3.307.000.500,00	Rp 3.162.478.250,00	Rp (144.522.250,00)
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.399.470.000,00	Rp 3.977.225.000,00	Rp 3.671.869.500,00	Rp (305.355.500,00)
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 145.500.000,00	Rp 166.700.000,00	Rp 108.700.000,00	Rp (58.000.000,00)
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 10.484.970.000,00	Rp 12.012.440.732,00	Rp 11.285.187.336,00	Rp (727.253.396,00)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / KURANG
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 84.783.588.444,00	Rp 90.221.859.898,79	Rp 74.881.145.553,00	Rp (15.340.714.345,79)
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 9.003.045.480,00	Rp 9.621.624.019,03	Rp 9.187.510.065,00	Rp (434.113.954,03)
2.2.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 6.224.778.480,00	Rp 6.833.357.019,03	Rp 6.439.681.950,00	Rp (393.675.069,03)
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.535.947.000,00	Rp 2.539.947.000,00	Rp 2.500.956.115,00	Rp (38.990.885,00)
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 43.200.000,00	Rp 43.200.000,00	Rp 42.255.000,00	Rp (945.000,00)
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 199.120.000,00	Rp 205.120.000,00	Rp 204.617.000,00	Rp (503.000,00)
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 24.396.928.855,00	Rp 25.122.206.705,00	Rp 23.743.552.600,00	Rp (1.378.654.105,00)
2.2.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.143.008.500,00	Rp 3.344.403.500,00	Rp 3.007.908.500,00	Rp (336.495.000,00)
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.131.619.100,00	Rp 15.718.512.950,00	Rp 14.893.693.100,00	Rp (824.819.850,00)
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.954.780.000,00	Rp 5.229.100.000,00	Rp 5.077.240.000,00	Rp (151.860.000,00)
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.167.519.255,00	Rp 830.190.255,00	Rp 764.711.000,00	Rp (65.479.255,00)
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 48.367.616.109,00	Rp 50.382.154.809,00	Rp 37.221.747.814,00	Rp (13.160.406.995,00)
2.3.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp 2.766.000.000,00	Rp 4.591.888.325,00	Rp 4.260.177.324,00	Rp (331.711.001,00)
2.4.	BELANJA TAK TERSANGKA	Rp 250.000.000,00	Rp 503.986.040,76	Rp 468.157.750,00	Rp (35.828.290,76)
	JUMLAH BELANJA	Rp 198.765.027.183,80	Rp 215.810.418.072,05	Rp 191.452.288.942,97	Rp (24.358.129.129,08)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 11.615.101.287,64	Rp (12.445.532.541,56)	Rp 10.544.426.831,41	Rp 22.989.959.372,97
III.	PEMBIAYAAN	Rp (11.615.101.287,64)	Rp 12.445.532.541,56	Rp (10.544.426.831,41)	Rp (22.989.959.372,97)
3.1.	Penerimaan Daerah	Rp -	Rp 23.601.226.051,71	Rp 23.593.098.352,71	Rp (8.127.699,00)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp -	Rp 23.601.226.051,71	Rp 23.575.925.951,71	Rp (25.300.100,00)
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Hutang Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp 17.172.401,00	Rp 17.172.401,00
3.2.	Pengeluaran Daerah	Rp 11.615.101.287,64	Rp 11.155.693.510,15	Rp 34.137.525.184,12	Rp 22.981.831.673,97
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.2.	Penyertaan Modal	Rp 11.154.658.980,15	Rp 11.154.658.980,15	Rp 11.154.658.980,15	Rp -
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 460.442.307,49	Rp 1.034.530,00	Rp 22.982.866.203,97	Rp 22.981.831.673,97
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp (11.615.101.287,64)	Rp 12.445.532.541,56	Rp (10.544.426.831,41)	Rp (22.989.959.372,97)

**DAFTAR RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
I.	PENDAPATAN	Rp 316.131.240.891,30	Rp 323.659.276.059,09	Rp 7.528.035.167,79	102,38
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 13.222.853.537,66	Rp 15.226.862.946,33	Rp 2.004.009.408,67	115,16
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 2.179.211.029,50	Rp 1.710.594.047,90	Rp (468.616.981,60)	78,50
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 3.503.784.325,00	Rp 2.808.798.821,71	Rp (694.985.503,29)	80,16
1.1.3.	Bagi Hasil Milik Perusahaan Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 7.539.858.183,16	Rp 10.707.470.076,72	Rp 3.167.611.893,56	142,01
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 302.908.387.353,64	Rp 304.478.577.748,00	Rp 1.570.190.394,36	100,52
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 23.137.141.353,64	Rp 30.141.209.871,00	Rp 7.004.068.517,36	130,27
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 230.448.600.000,00	Rp 230.449.000.000,00	Rp 400.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 43.830.000.000,00	Rp 41.235.000.000,00	Rp (2.595.000.000,00)	94,08
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	Rp 5.492.646.000,00	Rp 2.653.367.877,00	Rp (2.839.278.123,00)	48,31
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	Rp -	Rp 3.953.835.364,76	Rp 3.953.835.364,76	
II.	BELANJA	Rp 329.114.107.095,27	Rp 298.204.211.410,20	Rp (30.909.895.685,07)	90,61
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 168.941.002.182,13	Rp 157.516.835.322,20	Rp (11.424.166.859,93)	93,24
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 122.152.454.920,20	Rp 116.920.371.626,00	Rp (5.232.083.294,20)	95,72
2.1.2.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 100.759.529.090,20	Rp 98.240.579.419,00	Rp (2.518.949.671,20)	97,50
2.1.3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.646.454.330,00	Rp 9.850.269.308,00	Rp (796.185.022,00)	92,52
2.1.4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 8.243.827.500,00	Rp 6.530.274.500,00	Rp (1.713.553.000,00)	79,21
2.1.5.	Belanja Pemeliharaan	Rp 2.502.644.000,00	Rp 2.299.248.399,00	Rp (203.395.601,00)	91,87

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 16.375.889.391,91	Rp 14.173.079.991,20	Rp (2.202.809.400,71)	86,55
2.1.2.1	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.987.772.603,91	Rp 3.098.584.287,77	Rp (889.188.316,14)	77,70
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.374.391.788,00	Rp 5.958.250.153,43	Rp (416.141.634,57)	93,47
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.908.025.000,00	Rp 5.016.875.500,00	Rp (891.149.500,00)	84,92
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 105.700.000,00	Rp 99.370.050,00	Rp (6.329.950,00)	94,01
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 30.412.657.870,03	Rp 26.423.383.705,00	Rp (3.989.274.165,03)	86,88
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 160.173.104.913,14	Rp 140.687.376.088,00	Rp (19.485.728.825,14)	87,83
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 9.830.839.410,00	Rp 9.620.080.023,00	Rp (210.759.387,00)	97,86
2.2.1.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 6.361.519.450,00	Rp 6.271.131.400,00	Rp (90.388.050,00)	98,58
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.043.469.960,00	Rp 2.923.608.623,00	Rp (119.861.337,00)	96,06
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 25.850.000,00	Rp 25.340.000,00	Rp (510.000,00)	98,03
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp -	100,00
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 40.161.739.692,00	Rp 37.711.865.358,00	Rp (2.449.874.334,00)	93,90
2.2.2.1.	Belanja Pegawai Personalia	Rp 3.972.558.000,00	Rp 3.726.873.750,00	Rp (245.684.250,00)	93,82
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 25.077.970.192,00	Rp 23.622.307.608,00	Rp (1.455.662.584,00)	94,20
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 7.837.825.000,00	Rp 7.449.949.500,00	Rp (387.875.500,00)	95,05
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 3.273.386.500,00	Rp 2.912.734.500,00	Rp (360.652.000,00)	88,98
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 83.903.226.047,56	Rp 70.991.262.312,00	Rp (12.911.963.735,56)	84,61
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 20.617.928.505,00	Rp 20.274.427.895,00	Rp (343.500.610,00)	98,33
2.4.	Belanja Tak Tersangka	Rp 5.659.371.258,58	Rp 2.089.740.500,00	Rp (3.569.630.758,58)	36,93
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (12.982.866.203,97)	Rp 25.455.064.648,89	Rp 38.437.930.852,86	(196,07)

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
III.	PEMBIAYAAN	Rp 12.982.866.203,97	Rp 12.982.866.203,97	Rp -	100,00
3.1.	Penerimaan Daerah	Rp 22.982.866.203,97	Rp 22.982.866.203,97	Rp -	100,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 22.982.866.203,97	Rp 22.982.866.203,97	Rp -	100,00
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
3.2.	Pengeluaran Daerah	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp -	100,00
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp -	100,00
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	-
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	Rp -	Rp 38.503.248.055,86	Rp 38.503.248.055,86	-



**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	352,890,767,007.68	352,292,362,738.38	(598,404,269.30)	99.83
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14,602,174,800.00	17,684,501,773.18	3,082,326,973.18	121.11
1.1.1.	Pajak Daerah	1,945,000,000.00	2,528,561,132.67	583,561,132.67	130.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	4,281,382,900.00	4,946,928,460.60	665,545,560.60	115.55
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	8,375,791,900.00	10,209,012,179.91	1,833,220,279.91	121.89
1.2.	Dana Perimbangan	331,345,062,087.68	327,122,411,920.00	(4,222,650,167.68)	98.73
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	38,266,062,087.68	34,136,411,920.00	(4,129,650,167.68)	89.21
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	243,635,000,000.00	243,635,000,000.00	-	100.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	49,444,000,000.00	49,351,000,000.00	(93,000,000.00)	99.81
1.3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	6,943,530,120.00	7,485,449,045.20	541,918,925.20	107.80
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.	6,943,530,120.00	7,485,449,045.20	541,918,925.20	107.80
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	352,890,767,007.68	352,292,362,738.38	(598,404,269.30)	99.83

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
		3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	380,014,015,063.54	339,160,122,691.59	(40,853,892,371.95)	89.25
2.1.	Belanja Tidak Langsung	140,186,801,677.09	136,170,753,178.00	(4,016,048,499.09)	97.14
2.1.1.	Belanja Pegawai	114,297,859,285.78	117,523,358,404.00	3,225,499,118.22	102.82
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	1,495,093,011.25	1,483,171,274.00	(11,921,737.25)	99.20
2.1.4.	Belanja Hibah	2,005,697,000.00	1,845,465,500.00	(160,231,500.00)	92.01
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10,162,489,000.00	8,652,489,000.00	(1,510,000,000.00)	85.14
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6,675,266,000.00	6,666,269,000.00	(8,997,000.00)	99.87
2.1.8.	Belanja tidak terduga	5,550,397,380.06	-	(5,550,397,380.06)	-
2.2.	Belanja Langsung	239,827,213,386.45	202,989,369,513.59	(36,837,843,872.86)	84.64
2.2.1.	Belanja Pegawai	28,275,788,258.00	25,089,376,450.00	(3,186,411,808.00)	88.73
2.2.2.	Belanja Barang dan jasa	77,064,927,689.00	68,439,454,804.59	(8,625,472,884.41)	88.81
2.2.3.	Belanja Modal	134,486,497,439.45	109,460,538,259.00	(25,025,959,180.45)	81.39
	JUMLAH BELANJA	380,014,015,063.54	339,160,122,691.59	(40,853,892,371.95)	89.25
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27,123,248,055.86)	13,132,240,046.79	40,255,488,102.65	10.58
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	38,503,248,055.86	38,437,930,852.86	(65,317,203.00)	99.83
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	38,503,248,055.86	38,437,930,852.86	(65,317,203.00)	99.83
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	38,503,248,055.86	38,437,930,852.86	(65,317,203.00)	99.83
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38,503,248,055.86	38,437,930,852.86	(65,317,203.00)	99.83

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11,380,000,000.00	11,397,172,401.00	17,172,401.00	100.15
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,380,000,000.00	11,380,000,000.00	-	100.00
3.2.3.	Pembayaran PFK		17,172,401.00	17,172,401.00	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,380,000,000.00	11,397,172,401.00	17,172,401.00	100.15
	Pembiayaan Netto	27,123,248,055.86	27,040,758,451.86	(82,489,604.00)	(0.32)
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan	-	40,172,998,498.65	40,172,998,498.65	10.26

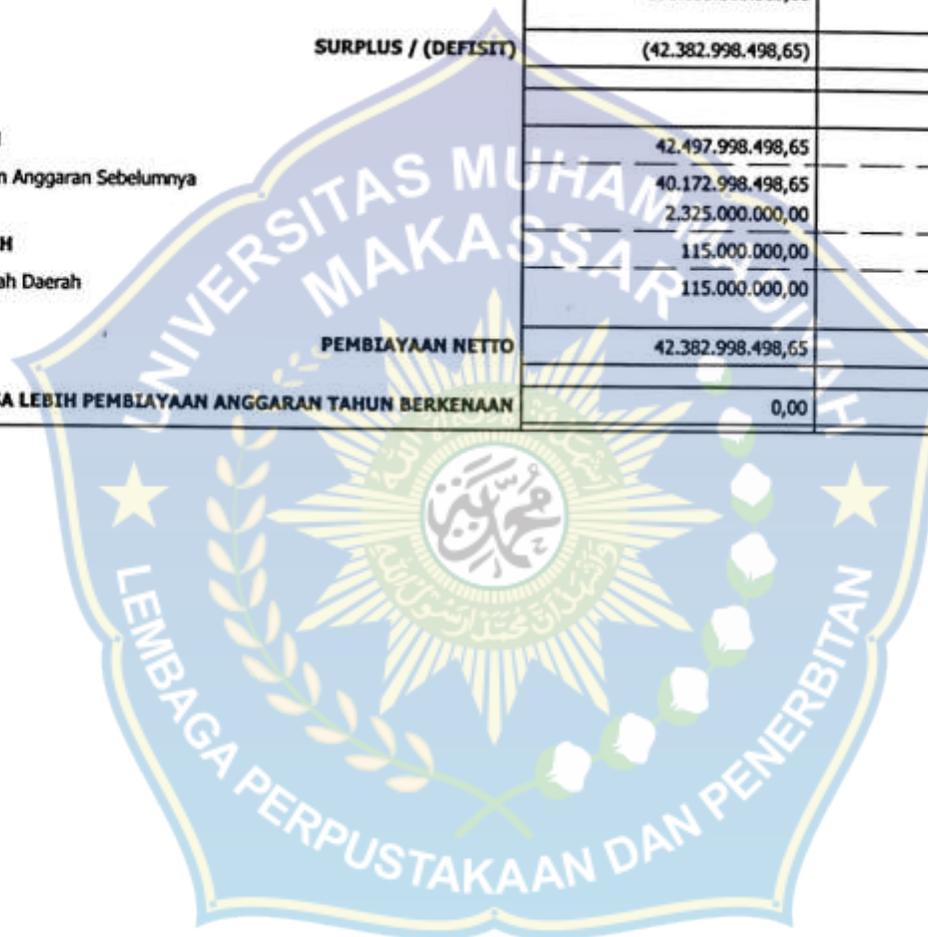


RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	415.267.339.700,64	414.614.843.299,21	(652.496.401,43)	99,84
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.199.611.100,64	16.918.809.690,38	1.719.198.589,74	111,31
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.946.230.276,00	1.956.584.022,00	(989.646.254,00)	66,41
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.840.099.845,00	5.086.060.081,10	1.245.960.236,10	132,45
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	251.275.576,49	251.275.576,49	0,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.413.280.979,64	9.624.890.010,79	1.211.609.031,15	114,40
2	DANA PERIMBANGAN	385.538.710.000,00	383.506.060.701,00	(2.032.649.299,00)	99,47
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.209.140.000,00	32.176.492.701,00	(2.032.647.299,00)	94,06
2.2	Dana Alokasi Umum	289.170.570.000,00	289.170.568.000,00	(2.000,00)	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	62.159.000.000,00	62.159.000.000,00	0,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.529.018.600,00	14.189.972.907,83	(339.045.692,17)	97,67
3.2	Dana Darurat	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	100,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.492.646.000,00	4.060.700.307,83	(431.945.692,17)	90,39
3.6	Dana Tunjangan Kependidikan	2.064.272.600,00	2.064.272.600,00	0,00	100,00
3.7	Dana Infrastruktur Sarana Prasarana	4.472.100.000,00	4.472.100.000,00	0,00	100,00
3.8	Dana Alokasi Khusus Tahun 2015	0,00	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00
	BELANJA DAERAH	457.650.338.199,29	377.440.386.415,57	(80.209.951.783,72)	82,47
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	192.719.048.734,99	186.767.590.435,00	(5.951.458.299,99)	96,91
1.1	Belanja Pegawai	151.234.682.658,99	147.088.094.148,00	(4.146.588.510,99)	97,26
1.3	Belanja Subsidi	1.945.165.075,00	1.945.165.075,00	0,00	100,00
1.4	Belanja Hibah	20.410.930.452,00	19.656.234.212,00	(754.696.240,00)	96,30
1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.288.914.000,00	13.074.262.000,00	(214.652.000,00)	98,38
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.339.356.549,00	4.878.835.000,00	(460.521.549,00)	91,37
1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	125.000.000,00	(375.000.000,00)	25,00
2	BELANJA LANGSUNG	264.931.289.464,30	190.672.795.980,57	(74.258.493.483,73)	71,97
2.1	Belanja Pegawai	24.957.310.500,00	21.363.047.092,00	(3.594.263.408,00)	85,60
2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.320.460.455,30	72.478.182.883,57	(16.842.277.571,73)	81,14

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.3	Belanja Modal	150.653.518.509,00	96.831.566.005,00	(53.821.952.504,00)	64,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.382.998.498,65)	37.174.456.883,64	79.557.455.382,29	(87,71)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.497.998.498,65	40.228.645.498,65	(2.269.353.000,00)	94,66
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.172.998.498,65	40.172.998.498,65	0,00	100,00
1.7	Pengembalian Dana Revolving	2.325.000.000,00	55.647.000,00	(2.269.353.000,00)	2,39
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.382.998.498,65	40.228.645.498,65	(2.154.353.000,00)	94,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	77.403.102.382,29	77.403.102.382,29	



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	365.601.107.138,56	334.380.353.045,15	(31.220.754.093,41)	91,46
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.563.906.855,81	22.856.821.790,51	(2.707.085.065,30)	89,41
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.041.118.888,00	1.769.235.446,25	(2.271.883.441,75)	43,78
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.721.463.362,00	5.449.099.750,62	1.727.636.388,62	146,42
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	502.551.152,00	287.828.470,38	(214.722.681,62)	57,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.298.773.453,81	15.350.658.123,26	(1.948.115.330,55)	88,74
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	336.037.200.282,75	301.253.606.254,64	(34.783.594.028,11)	89,65
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	324.422.384.282,75	292.485.641.343,00	(31.936.742.939,75)	90,16
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	51.286.322.754,46	22.589.275.687,00	(28.697.047.067,46)	44,05
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.088.277.528,29	848.581.656,00	(3.239.695.872,29)	20,76
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	221.148.784.000,00	221.148.784.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	47.899.000.000,00	47.899.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.964.816.000,00	4.964.815.500,00	(500,00)	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	4.964.816.000,00	4.964.815.500,00	(500,00)	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	6.650.000.000,00	3.803.149.411,64	(2.846.850.588,36)	57,19
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.650.000.000,00	3.803.149.411,64	(2.846.850.588,36)	57,19
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.000.000.000,00	10.269.925.000,00	6.269.925.000,00	256,75
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	6.269.925.000,00	6.269.925.000,00	0,00
2	BELANJA	468.537.168.345,85	389.114.515.454,79	(79.422.652.891,06)	83,05
2.1	BELANJA OPERASI	295.947.868.959,85	273.373.208.391,79	(22.574.660.568,06)	92,37
2.1.1	Belanja Pegawai	156.389.276.706,19	149.370.307.895,80	(7.018.968.810,39)	95,51
2.1.2	Belanja Barang	97.498.813.455,66	83.157.882.697,99	(14.340.930.757,67)	85,29
2.1.4	Belanja Subsidi	1.445.512.123,00	1.445.512.123,00	0,00	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	24.212.627.500,00	23.520.235.875,00	(692.391.625,00)	97,14
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.139.722.375,00	6.617.353.000,00	(522.369.375,00)	92,68
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	9.261.916.800,00	9.261.916.800,00	0,00	100,00

	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	BELANJA MODAL	170.218.742.750,00	114.361.307.063,00	(55.857.435.687,00)	67,18
2.2.1	Belanja Tanah	4.981.898.509,00	3.055.001.950,00	(1.926.896.559,00)	61,32
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.360.987.713,00	24.994.678.150,00	(1.366.309.563,00)	94,82
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	51.093.490.813,00	31.100.768.043,00	(19.992.722.770,00)	60,87
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.342.320.685,00	53.777.213.890,00	(32.565.106.795,00)	62,28
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.440.045.030,00	1.433.645.030,00	(6.400.000,00)	99,56
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.370.556.636,00	1.380.000.000,00	(990.556.636,00)	58,21
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.370.556.636,00	1.380.000.000,00	(990.556.636,00)	58,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.936.061.207,29)	(54.734.162.409,64)	48.201.898.797,65	53,17
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	107.472.801.559,29	107.332.098.922,29	(140.702.637,00)	99,87
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	77.472.801.559,29	77.272.903.922,29	(199.897.637,00)	99,74
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	59.195.000,00	59.195.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	4.536.740.352,00	3.731.449.777,00	(805.290.575,00)	82,25
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	737.500.000,00	500.000.000,00	(237.500.000,00)	67,80
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.799.240.352,00	3.231.449.777,00	(567.790.575,00)	85,06
	PEMBIAYAAN NETTO	102.936.061.207,29	103.600.649.145,29	664.587.938,00	100,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	48.866.486.735,65	48.866.486.735,65	0,00

DAFTAR REKAPAN ABSEN PADA SKPD
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
(PERIODE TAHUN 2010-2017)

NO	SKPD	PERSENTASE KEHADIRAN							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DINAS-DINAS	87,78%	86,46%	86,26%	84,98%	86,01%	87,24%	89,89%	93,80%
	1. DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80,56%	80,30%	79,40%	81,70%	83,30%	84,70%	90,30%	91,00%
	2 DINAS PENDIDIKAN	94,43%	92,18%	91,20%	90,30%	91,70%	93,60%	95,61%	95,00%
	3 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	83,70%	82,70%	82,60%	82,50%	84,30%	89,13%	90,19%	96,70%
	4 DINAS KESEHATAN	92,77%	90,20%	90,00%	90,02%	92,10%	92,75%	93,30%	93,80%
	5 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89,30%	88,10%	87,60%	85,30%	85,50%	82,18%	83,90%	94,20%
	6 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	79,01%	80,00%	80,87%	81,40%	82,40%	83,89%	86,50%	94,30%

	2 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS	88,00%	87,85%	87,00%	83,98%	83,90%	84,90%	92,30%	97,18%
	3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	94,56%	94,00%	93,55%	93,00%	94,40%	97,82%	95,12%	96,12%
	4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	79,98%	78,60%	79,00%	80,20%	81,20%	83,60%	84,31%	89,17%
	5 BADAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-							
	6 INSPEKTORAT	93,12%	93,25%	93,78%	85,60%	84,08%	88,31%	86,30%	93,03%
	7 BPKP2	90,80%	86,42%	86,00%	85,70%	86,32%	87,92%	85,70%	90,12%
VI	RSUD	95,13%	94,50%	94,15%	93,20%	86,70%	87,90%	91,20%	93,05%
VII	KANTOR-KANTOR	84,94%	82,90%	82,74%	81,99%	82,89%	84,93%	85,57%	91,45%
	1 KANTOR SAT. POL. PP	89,16%	86,60%	86,30%	83,98%	83,77%	86,74%	87,32%	90,67%
	2 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	87,56%	86,40%	86,50%	83,98%	84,50%	85,00%	84,20%	90,26%
	3 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	80,34%	79,23%	79,06%	80,00%	81,23%	83,40%	85,00%	91,12%

IX	KELURAHAN	85,33%	80,47%	79,80%	83,98%	81,20%	83,88%	82,90%	90,12%
	1 KELURAHAN OHOIJANG WATDEK	85,33%	80,47%	79,80%	83,98%	81,20%	83,88%	82,90%	90,12%
		2842,00%	2793,36%	2784,67%	2760,15%	2779,79%	2838,04%	2885,47%	3053,27%
	PERSENTASI KEHADIRAN PER TAHUN	86,12%	84,64%	84,38%	83,64%	84,24%	86,00%	87,44%	92,52%



DAFTAR CAPAIAN PROGRAM KERJA
KABUPATEN GOWA
(PERIODE TAHUN 2011-2016)

Jenis Bidang	2011		2012		2013		2015	
	jumlah PK	capaian kinerja	jumlah PK	capaian kinerja	jumlah PK	capaian kinerja	jumlah PK	capaian kinerja
BIDANG ANDALAN	7	87,04%	16	87,27%	21	88,33%	61	95,70%
perikanan dan kelautan	3	100,00%	7	89,30%	10	90,00%	39	95,30%
politeknik perikanan	3	61,11%	2	78,20%	-	-	1	100,00%
perdagangan	1	100,00%	3	86,15%	4	75,00%	8	87,50%
pariwisata	-	-	4	95,41%	7	100,00%	13	100,00%
BIDANG PENENTU	65	81,30%	73	85,51%	164	87,01%	251	93,52%
dinas pendapatan daerah	3	100,00%	7	100,00%	9	74,11%	20	95,00%
umum pemerintahan	17	97,32%	28	88,21%	105	92,92%	206	92,71%
perhubungan dan prasarana wilayah	45	46,57%	38	68,33%	50	94,00%	25	92,86%
BIDANG KEBUTUHAN DASAR	49	79,62%	117	79,11%	279	94,15%	337	98,73%
agama	4	50,00%	7	100,00%	12	100,00%	3	100,00%
dinas kesehatan	11	100,00%	36	93,81%	95	98,94%	129	100,52%
bidang keamanan	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%	-	-
Hukum dan HAM	1	100,00%	2	75,00%	10	94,00%	3	100,00%
permukiman	12	47,92%	18	80,24%	27	96,30%	10	100,00%
badan kesbang linmas	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
dinas kehutanan	4	97,50%	9	68,60%	16	75,00%	57	96,01%
dinas pendidikan nasional	17	69,12%	39	85,50%	112	96,43%	120	100,00%

dinas pertanian dan peternakan	3	100,00%	2	89,03%	4	92,50%	15	94,60%
BIDANG PENUNJANG	17	99,80%	20	96,88%	38	94,35%	117	97,43%
informasi dan komunikasi	1	100,00%	1	100,00%	3	100,00%	16	100,00%
perindustrian	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	6	83,33%
ketenagakerjaan	5	100,00%	4	92,67%	4	75,00%	13	96,15%
dinas koperasi dan PKM	2	100,00%	2	100,00%	4	103,75%	16	95,31%
kebudayaan	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	4	100,00%
kesejahteraan sosial	2	100,00%	3	100,00%	6	100,00%	17	100,00%
bidang lingkungan hidup					1	100,00%	6	100%
kependudukan dan KB	1	100,00%	3	100,00%	7	80,00%	15	107,66%
olahraga	1	100,00%	2	100,00%	5	100,00%	8	100,00%
bidang gender					2	100,00%	3	100%
pertahanan dan tata ruang					2	83,50%	3	87%
perkebunan dan hortikultura	3	91,67%	2	79,25%	1	90,00%	10	100,00%



T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Rasio tk kemandiran (sebelum)	,0394722	4	,00590953	,00295476
	Rasio tk kemandiran (sesudah)	,0486860	4	,01357914	,00678957
Pair 2	Rasio efektifitas (sebelum)	,8786229	4	,07110359	,03555180
	Rasio efektifitas (sesudah)	1,0924641	4	,13824579	,06912290
Pair 3	Rasio efisiensi (sebelum)	,0457500	4	,01392516	,00696258
	Rasio efisiensi (sesudah)	,0353903	4	,01092566	,00546283
Pair 4	Rasio belanja rutin terhadap APBD (sebelum)	,4874889	4	,13433457	,06716728
	Rasio belanja rutin terhadap APBD (sesudah)	,5077830	4	,21103443	,10551722
Pair 5	Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sebelum)	,3643468	4	,11248425	,05624213
	Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sesudah)	,4216592	4	,07342758	,03671379

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Rasio tk kemandiran (sebelum) & Rasio tk kemandiran (sesudah)	4	,667	,333
Pair 2	Rasio efektifitas (sebelum) & Rasio efektifitas (sesudah)	4	,524	,476
Pair 3	Rasio efisiensi (sebelum) & Rasio efisiensi (sesudah)	4	-,393	,607
Pair 4	Rasio belanja rutin terhadap APBD (sebelum) & Rasio belanja rutin terhadap APBD (sesudah)	4	,345	,655
Pair 5	Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sebelum) & Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sesudah)	4	,759	,241

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Rasio tk kemandran (sebelum) - Rasio tk kemandran (sesudah)	-,009214	,01059442	,00529721	-,026072	,00784429	-1,739	3	,180
Pair 2	Rasio efektifitas (sebelum) - Rasio efektifitas (sesudah)	-,213841	,11773416	,05886708	-,401183	-,026500	-3,633	3	,036
Pair 3	Rasio efisiensi (sebelum) - Rasio efisiensi (sesudah)	,01035974	,02080396	,01040198	-,022744	,04346348	,996	3	,393
Pair 4	Rasio belanja rutin terhadap APBD (sebelum) - Rasio belanja rutin terhadap APBD (sesudah)	-,020294	,20747356	,10373678	-,350431	,30984256	-,196	3	,857
Pair 5	Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sebelum) - Rasio belanja pembangunan terhadap APBD (sesudah)	-,057312	,07421606	,03710803	-,175407	,06078191	-1,544	3	,220

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Rasio pertumbuhan PAD (sebelum)	,1484758	4	,19625800	,09812900
	Rasio pertumbuhan PAD (sesudah)	,2327493	4	,22195249	,11097625
Pair 2	Rasio pertumbuhan pendapatan (sebelum)	,1886075	4	,31329457	,15664728
	Rasio pertumbuhan pendapatan (sesudah)	,1407445	4	,32754470	,16377235
Pair 3	Rasio pertumbuhan belanja rutin (sebelum)	,2072496	4	,67070838	,33535419
	Rasio pertumbuhan belanja rutin (sesudah)	,2627529	4	,26998396	,13499198
Pair 4	Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sebelum)	,4885683	4	,85624874	,42812437
	Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sesudah)	,2152	4	,56186	,28093

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Rasio pertumbuhan PAD (sebelum) & Rasio pertumbuhan PAD (sesudah)	4	-.632	,368
Pair 2	Rasio pertumbuhan pendapatan (sebelum) & Rasio pertumbuhan pendapatan (sesudah)	4	,989	,011
Pair 3	Rasio pertumbuhan belanja rutin (sebelum) & Rasio pertumbuhan belanja rutin (sesudah)	4	,554	,446
Pair 4	Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sebelum) & Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sesudah)	4	,881	,119

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio pertumbuhan PAD (sebelum) - Rasio pertumbuhan PAD (sesudah)	-.084273	,37792093	,18896046	-.685630	,51708309	-.446	3	,686
Pair 2	Rasio pertumbuhan pendapatan (sebelum) - Rasio pertumbuhan pendapatan (sesudah)	,04786304	,04943598	,02471799	-.030801	,12652672	1,936	3	,148
Pair 3	Rasio pertumbuhan belanja rutin (sebelum) - Rasio pertumbuhan belanja rutin (sesudah)	-.055503	,56757508	,28378754	-.958642	,84763533	-.196	3	,857
Pair 4	Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sebelum) - Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (sesudah)	,27338060	,44807851	,22403926	-.439612	,98637350	1,220	3	,310

T-TEST

PAIRS = kinerja_sbl kehadiran_sbl WITH kinerja_ssd Kehadiran_ssd (PAIRED)
 /CRITERIA = CI(.95)
 /MISSING = ANALYSIS.

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tingkat capaian kinerja (sbl)	,8836417	3	,02251600	,01299962
	Tingkat capaian kinerja (ssd)	,8996727	3	,21236132	,12260687
Pair 2	Tingkat kehadiran pegawai (sbl)	,8472449	4	,00707073	,00353536
	Tingkat kehadiran pegawai (ssd)	,8766071	4	,04099001	,02049500

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Tingkat capaian kinerja (sbl) & Tingkat capaian kinerja (ssd)	3	,745	,465
Pair 2	Tingkat kehadiran pegawai (sbl) & Tingkat kehadiran pegawai (ssd)	4	-,973	,027

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper			
Pair 1	Tingkat capaian kinerja (sbl) - Tingkat capaian kinerja (ssd)	-,016031	,19616845	,11325791	-,503341 ,47127837	-,142	2	,900
Pair 2	Tingkat kehadiran pegawai (sbl) - Tingkat kehadiran pegawai (ssd)	-,029362	,04789847	,02394923	-,105579 ,04685495	-1,225	3	,308

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Risa Ardianti lahir di Dusun Garing Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tanggal 20 Agustus 1995. Penulis adalah anak pertama dari enam bersaudara pasangan dari Abd.Salam dan Syaruni. Penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak di TK Al-Qadri Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa selama satu tahun dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tahun 2000 sampai tahun 2007. Pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan di MTs Yapit Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Gowa Universitas Muhammadiyah Makkasar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Pogram Akuntansi sampai sekarang. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pmerintah Daerah Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa” dengan bantuan Bapak Drs.Sanusi, A.M, SE, M.Si dan Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, AK, CA.